

## OPTIMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Timbul<sup>1</sup>, Parulian Hutagaol<sup>2</sup>, Ma'mun Sarma<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

<sup>3</sup>Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

### ABSTRACT

*Alongside the perceived complexity of state financial management by some members of society, the management of state finances fundamentally aligns with the goal of achieving good governance. There are four fundamental principles of state financial management based on good governance: (1) accountability in financial management based on results or performance; (2) transparency in every government transaction; (3) empowerment of professional managers; and (4) the presence of a strong, professional, and independent external audit institution, avoiding duplication in audit implementation. This study aims to formulate optimization strategies for regional financial management to enhance the financial performance of the region in Bogor Regency using SWOT analysis. The analysis resulted in four strategies, namely strengthening local government policy regulations on financial governance to facilitate implementation and enhance the effectiveness of financial governance in accordance with regulations; increasing the government's commitment to the development of human resources and competencies of financial management officials; improving the quality of information systems and technology to strengthen the database and accuracy of local financial management; and enhancing monitoring and evaluation of financial management.*

*Keywords: Effectiveness, Finance, Strategy, SWOT*

### ABSTRAK

Seiring dengan dianggap rumitnya pengelolaan keuangan negara oleh sebagian masyarakat, namun pada dasarnya pengelolaan keuangan negara sejalan dengan tujuan tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Terdapat 4 (empat) prinsip dasar pengelolaan keuangan negara berlandaskan pemerintahan yang baik adalah (1) akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berdasarkan hasil atau kinerja; (2) keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah; (3) pemberdayaan manajer profesional dan (4) adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimasi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Bogor dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis diperoleh empat strategi, yaitu penguatan kebijakan peraturan pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan untuk mempermudah pelaksanaan serta efektivitas tata kelola keuangan sesuai aturan; peningkatan komitmen pemerintah dalam pengembangan SDM dan kompetensi aparatur pengelola keuangan; peningkatan kualitas sistem informasi dan teknologi untuk memperkuat database dan akurasi pengelolaan keuangan daerah; serta peningkatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: Efektivitas, Keuangan, Strategi, SWOT

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung oleh pengelolaan keuangan yang baik pula. Terdapat 4 (empat) prinsip dasar pengelolaan keuangan negara berlandaskan pemerintahan yang baik adalah (1) akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berdasarkan hasil atau kinerja; (2) keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah; (3)

pemberdayaan manajer profesional dan (4) adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Keadaan demikian berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan

aktivitasnya. Standarisasi kinerja dapat menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan *Standar Operational Prosedur* (Bahrullah 2013).

Keperluan untuk menentukan prioritas program dalam perencanaan pembangunan daerah semakin terasa penting jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah saat ini. Salah satu ciri utama otonomi daerah, sebagaimana yang tersirat dalam UU Nomor 9 Tahun 2015, adalah daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya sendiri untuk pembiayaan pembangunan daerah. Kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri bertujuan antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2015. Pembangunan di Kabupaten Bogor yang dibiayai oleh APBD tahun 2014 menghabiskan 4,89 triliun rupiah dari anggaran 5,78 triliun rupiah. Pendapatan tahun 2015 sebesar 5,64 triliun rupiah naik sebesar 478 miliar rupiah atau sekitar 9,26 persen dari anggaran pendapatan tahun 2014 (5,16 triliun rupiah).

Realisasi total pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun 2014 (5,37 triliun rupiah) bersumber dari dana perimbangan sebesar 46,46 persen, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 31,85 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 21,70 persen. Dari komponen PAD, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 66,06 persen, kemudian lain-lain PAD yang sah sebesar 21,41 persen, retribusi daerah sebesar 11,65 persen dan sisanya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,88 persen. Berdasarkan data statistik keuangan pemerintah daerah tahun 2014-2015, pada tahun 2014 terjadi defisit anggaran sebesar 11,91 persen dan tahun 2015 juga terdapat defisit anggaran sebesar 18,59 persen. Berdasarkan data LHP 2014 dan 2015

anggaran belanja lebih besar daripada penerimaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan terdapatnya perbedaan antara target dengan realisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor. Terjadinya defisit anggaran disebabkan oleh berbagai hal baik internal maupun eksternal pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam perspektif sumber pembiayaan, pembangunan daerah itu dapat dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, yaitu pembangunan yang harus dibiayai oleh APBD yang bersumber pada pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, pinjaman daerah dan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Kedua, pembangunan yang merupakan kewajiban pemerintah pusat tetapi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Biaya pembangunan diambil dari APBN yang kemudian ditransfer ke APBD. Ketiga, pembangunan yang dibiayai APBN dan langsung dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat dengan mengambil lokasi pada daerah. Berdasarkan ketiga perspektif ini maka sangat penting sekali bagi suatu daerah untuk dapat melaksanakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan bukan hanya untuk menggali sumber-sumber penerimaannya saja namun juga termasuk bagaimana mengatur pengeluarannya. Tidak efektifnya pengelolaan keuangan daerah dapat dipastikan akan menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah tidak optimal karena terjadinya inefisiensi anggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian untuk merumuskan strategi optimasi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Bogor.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilih karena memiliki pagu anggaran yang besar namun penerapan pengelolaan keuangan belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan adanya defisit anggaran pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan mulai dari

bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada unsur pimpinan dan manajerial SKPD atas pertimbangan kompetensi mereka terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, kuesioner SWOT. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh berupa dokumen dan informasi dari lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, studi pustaka, majalah, surat kabar, internet, dan publikasi lembaga-lembaga pemerintah maupun literatur lainnya.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode panel data untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Stata. Sedangkan analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menginterpretasikan hasil data kuantitatif mengenai kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini mempergunakan metode pengambilan sampel dengan judgement sampling, karena melibatkan berbagai pihak yang dipilih berdasarkan judgement tertentu yaitu pihak yang memahami kondisi dan sistem pengelolaan keuangan di Pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Pihak-pihak tersebut berjumlah 29 orang dari berbagai instansi: sekretariat DPRD, sekretariat daerah, inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

### **Model Analisis dan Pengolahan Data Analisis SWOT**

Tahap pengumpulan data merupakan kegiatan pengklasifikasikan data eksternal dan internal melalui penetapan faktor strategi yang bersifat internal (IFE) dan faktor strategi yang bersifat eksternal (EFE) melalui sebuah matriks. Tahap analisis adalah tahapan dimana semua informasi yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur pengelola aset daerah dikumpulkan dan memanfaatkan informasi tersebut ke dalam model-model kuantitatif perumusan strategi (Rangkuti 1997), yakni model SWOT. Proses pengambilan keputusan sangat berhubungan dengan misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi. Matriks SWOT menghasilkan alternatif strategis dan dapat membandingkan antara faktor eksternal dengan internal.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor**

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah Kabupaten Bogor berusaha melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih kurang efektif. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai kontributor dalam

mendorong laju pembangunan di daerah. Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan maka formula perhitungannya adalah, ratio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan, dimana

semakin besar ratio yang diperoleh maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah, dan apa bila semakin kecil ratio yang diperoleh maka semakin tidak efektif pula pengelolaan keuangan daerahnya.

Tabel 1. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor tahun 2011-2015

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)
2011	264,783,920,000.00	213,998,416,619.00	80.82
2012	399,805,356,000.00	280,086,267,086.00	70.00
2013	688,423,393,000.00	510,315,301,049.00	74.12
2014	615,253,802,000.00	478,201,864,694.00	77.72
2015	955,749,821,000.00	394,648,869,396.00	41.29

Sumber: LHP BPK RI (2015), diolah

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2011 tingkat efektifitas pengelolaan keuangan sebesar 80,82% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan tingkat efektifitas pengelolaan keuangan menjadi sebesar 70,00% dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2013 persentase efektifitas pengelolaan keuangan mengalami peningkatan menjadi 74,12% namun tetap pada kriteria kurang efektif. pada tahun 2014 tingkat efektifitasnya sebesar 77,72% dengan kriteria kurang efektif. Kemudian di tahun 2015 kembali turun menjadi 41,29% dengan kriteria yang tidak efektif. Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2015, rendahnya nilai rasio efektifitas tahun 2015 tersebut secara umum disebabkan oleh rendahnya nilai realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penerimaan yang ingin dicapai, namun secara khusus disebabkan oleh pos anggaran belanja sosial yang nilai pencapaian selama satu tahun anggaran hanya Rp3,570,135,000.00 dari target belanja sosial tahun 2015 Rp33,158,500,000.00 atau sekitar 10,77%. Apabila anggaran belanja sosial

Rp3,570,135,000.00 dibandingkan dengan total anggaran Rp394,648,869,396.00 nilai pencapaiannya hanya sekitar 0,9 %. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya program sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak terealisasi serta dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Hibah yang tidak dapat dicairkan karena penerima manfaat tidak memiliki badan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor secara umum perlu dibenahi mengingat nilai efektifitas yang secara umum mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun anggaran 2011 dan 2015 walaupun sering terjadi fluktuasi setiap tahunnya antara pagu anggaran dengan belanja daerah yang dikeluarkan.

**Strategi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Bogor**

**Analisis Faktor Internal**

Hasil matrik *Internal Factor Evaluation* (IFE) disampaikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Matrik *Internal Factor Evaluation* (IFE)

No.	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor Terbobot
1	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang mendukung dalam efektifitas pengelolaan keuangan	0.1600	3.6552	0.5848

2	Struktur Organisasi yang jelas dalam tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bogor	0.1410	3.6897	0.5202
3	Adanya hubungan baik antar UPTD pengelola keuangan daerah di Kabupaten Bogor	0.1180	3.3448	0.3947
4	Pagu anggaran yang memadai yang mendukung peningkatan kinerja pegawai UPTD di Kabupaten Bogor	0.1000	3.1379	0.3138
5	Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pengelola anggaran di UPTD dalam mewujudkan tujuan pemerintah daerah	0.0880	3.8621	0.3399
6	Sumberdaya aparatur (SDM) pengelola keuangan secara kuantitas cukup memadai di kabupaten bogor	0.0900	3.5862	0.3228
<b>No.</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Skor Terbobot</b>
7	Belum optimalnya sumberdaya aparatur pengelola keuangan dalam menerapkan standar operasional dan prosedur (SOP) keuangan daerah	0.0920	1.6552	0.1523
8	Pengembangan SDM dan kompetensi aparatur pengelola keuangan saat ini masih kurang memadai	0.0800	1.8276	0.1462
9	Kurangnya ketegasan/sangsi bagi aparatur pengelola keuangan yang melakukan kesalahan	0.0700	1.8621	0.1303
10	Seringnya terjadi mutasi/ pergeseran pejabat pengelola keuangan yang kurang berpengalaman	0.0610	1.8621	0.1136
<b>Total</b>		<b>1</b>		<b>3.0186</b>

Sumber: Data primer (2017), diolah

### Analisis Faktor Eksternal

Hasil matrik *External Factor Evaluation* (EFE) disampaikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Matrik *External Factor Evaluation* (EFE)

No.	Peluang	Bobot	Rating	Skor Terbobot
1	Peraturan pemerintah tentang tata kelola keuangan daerah, untuk mempermudah pelaksanaan tata kelola sesuai dengan aturan	0.2390	3.4828	0.8324
2	Adanya dana insentif daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik/ opini WTP	0.1780	3.1379	0.5586
3	Komitmen pemerintah yang baik dalam meningkatkan kualitas aparatur.	0.1360	3.8276	0.5206
4	Adanya pengawasan pengelolaan keuangan terjadwal dari DPRD dan lembaga lain	0.1220	3.6897	0.4501
No.	Ancaman	Bobot	Rating	Skor Terbobot
1	Sistem dan teknologi pengelolaan keuangan yang terbatas antar SKPD (masih semi otomatis) dengan database keuangan yang belum terpusat	0.1140	1.5517	0.1769
2	Perbedaan format pertanggungjawaban keuangan antara pusat, provinsi dan daerah	0.1070	1.7586	0.1882
3	Suasana politik yang sering menyebabkan perubahan tata kelola keuangan daerah	0.1050	1.3793	0.1448
<b>Total</b>		<b>1</b>		<b>2.8715</b>

Sumber: Data primer (2017), diolah

### Matrik Internal Eksternal

		SKOR TOTAL IFE		
		Kuat	Rata-rata	Lemah
		4,0	3,0	2,0
SKOR TOTAL EFE	4,0			
	Tinggi	I Grow and Build	II Grow and Build	III Hold and Maintain
	3,0			
	Rata-rata	IV Grow and Build	V Hold and Maintain	VI Harvest and Divestiture
2,0				
Rendah	VII Hold and Maintain	VIII Harvest and Divestiture	IX Harvest and Divestiture	
		1,0		

Sumber: Data primer (2017), diolah

Gambar 1. Matrik internal-eksternal efektivitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Hasil Matrik Internal-Eksternal strategi efektivitas pengelolaan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bogor

menunjukkan hasil berada pada sel IV dengan strategi yang tepat adalah strategi *Grow and Build*.

**Matrik SWOT**

Tabel 4. Matrik SWOT Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan dalam rangka Peningkatan Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten

<b>INTERNAL</b>	<b>Kekuatan (S)</b> 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang mendukung dalam efektivitas pengelolaan keuangan. 2. Struktur organisasi yang jelas dalam tata Kelola keuangan daerah di Kabupaten Bogor. 3. Adanya hubungan baik antar UPTD pengelola keuangan daerah di Kabupaten Bogor. 4. Pagu anggaran yang memadai yang mendukung peningkatan kinerja pegawai UPTD di Kabupaten Bogor. 5. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pengelola anggaran di UPTD dalam mewujudkan tujuan pemerintah daerah. 6. Sumberdaya aparatur (SDM) pengelola keuangan secara kuantitas cukup memadai di Kabupaten Bogor.	<b>Kelemahan (W)</b> 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur pengelola keuangan dalam menerapkan standar operasional dan prosedur (SOP) keuangan daerah. 2. Pengembangan SDM dan kompetensi aparatur pengelola keuangan saat ini masih kurang memadai. 3. Kurangnya ketegasan/sangsi bagi aparatur pengelola keuangan yang melakukan kesalahan.
<b>EKSTERNAL</b>		
<b>Peluang (O)</b> 1. Peraturan pemerintah tentang tata Kelola keuangan daerah untuk mempermudah pelaksanaan tata Kelola sesuai dengan aturan 2. Adanya dana insentif daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik/opini wtp. 3. Komitmen pemerintah yang baik dalam meningkatkan kualitas aparatur. 4. Adanya pengawasan pengelolaan keuangan terjadwal dari DPRD dan lembaga lain.	<b>Strategi SO</b> Penguatan kebijakan peraturan pemerintah daerah tentang tata Kelola keuangan untuk mempermudah pelaksanaan serta efektivitas tata Kelola keuangan sesuai aturan (S1, S2, S3, S4, S5, O1, O3)	<b>Strategi WO</b> Peningkatan komitmen pemerintah dalam pengembangan SDM dan kompetensi aparatur pengelola keuangan (W1, W2, W3, O3, O4)
<b>Ancaman (T)</b> 1. Sistem dan teknologi pengelolaan keuangan yang terbatas (masih semi otomatis) dengan database keuangan yang belum terpusat. 2. Perbedaan format pertanggungjawaban keuangan antara pusat dan daerah. 3. Suasana politik yang sering menyebabkan perubahan tata Kelola keuangan daerah.	<b>Strategi ST</b> Peningkatan kualitas system informasi dan teknologi untuk memperkuat database dan akurasi pengelolaan keuangan daerah (S2, S3, S4, T1, T2)	<b>Strategi WT</b> Peningkatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan (W1, W3, W4, T2, T3)

Sumber: Data primer (2017), diolah

Strategi utama yang harus dilakukan pemerintah adalah penguatan kebijakan peraturan pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan untuk mempermudah pelaksanaan serta efektivitas tata kelola keuangan sesuai aturan.

**Rancangan Strategi dan Program**

Tabel 5. Strategi, program, dan kegiatan efektivitas tata kelola keuangan

Strategi	Program	Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan
Penguatan kebijakan peraturan pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan Untuk mempermudah pelaksanaan serta efektivitas tata kelola keuangan sesuai aturan	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Koordinasi dan sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD	2017
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Koordinasi dan sosialisasi antar SKPD terkait rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang APBD	2017
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2018
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran pemerintahan daerah	Pembuatan laporan keuangan semesteran pemerintahan daerah	Tersusunnya laporan keuangan semesteran pemerintahan daerah	2018
	penyusunan rancangan peraturan dan keputusan tentang pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan akuntansi keuangan daerah.	Pembuatan rancangan peraturan dan keputusan tentang pengelolaan keuangan daerah dan enyusunan akuntansi keuangan daerah.	Tersusunnya ancangan peraturan dan keputusan tentang pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan akuntansi keuangan daerah.	2018

Sumber: Data primer (2017), diolah

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis diperoleh empat strategi, yaitu penguatan kebijakan peraturan pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan untuk mempermudah pelaksanaan serta efektivitas tata kelola keuangan sesuai aturan; peningkatan komitmen pemerintah dalam pengembangan SDM dan kompetensi aparatur pengelola keuangan; peningkatan kualitas sistem informasi dan teknologi untuk memperkuat database dan akurasi pengelolaan keuangan

daerah; serta peningkatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan.

**Saran**

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dalam bidang sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan SDM proses mutas aparatur pengelola asset daerah sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi aparatur tersebut.
2. Penambahan anggaran untuk kegiatan pengelola keuangan yang dikhususkan untuk peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badrudin. 2013. *Dasar–dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bahrullah A. 2013. *Akuntansi Pemerintah Cetakan I*. Jakarta: CV. Bumi Metro Jaya.
- David, F.R. 2004. *Manajemen Strategis: Konsep*. Edisi ketujuh. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. 2015. *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2015*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Rangkuti, F. 1997. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyanto. 1995. *Metodologi Penelitian*. UNS Press. Surakarta.

